

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi global saat ini mengharuskan masyarakat untuk selalu siap menghadapi permasalahan ekonomi yang ada. Dengan segala Kondisi, masyarakat mau tidak mau harus menghadapi berbagai masalah global. Namun dalam kondisi ini, hal yang perlu ditekankan yaitu mengenai masalah pembangunan nasional. Pembangunan nasional sendiri mempunyai peranan yang penting dalam aspek kehidupan, aspek politik, sosial termasuk aspek ekonomi. Dengan Pentingnya pembangunan ekonomi didalam perekonomian membuat sebuah negara berupaya membuat kebijakan yang berfokus ke pembangunan perekonomian, baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang yang akan mengubah struktur ekonomi (Ishak, 2018).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil dari usaha dalam melaksanakan pembangunan ekonomi yang telah dilakukan oleh suatu negara atau suatu daerah. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan bila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar

daripada tahun sebelumnya. Indeks pembangunan manusia merupakan salah satu indikator untuk mengetahui pembangunan ekonomi yang mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk, yaitu kesehatan, tingkat pendidikan dan indikator ekonomi lainnya (Utami, 2020).

Pembangunan ekonomi dijadikan sebagai indikator utama bagi negara yang sedang berkembang. Secara sederhana pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai usaha atau proses untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik dari sebelumnya atau meningkatkan kualitas yang lebih baik, sehingga kesejahteraan dan kemakmuran semakin tinggi. Pembangunan ekonomi juga identik dalam menciptakan dan mempertahankan serta meningkatkan pendapatan nasional (Hasibuan dan Sulaiman, 2019).

Salah satu indikator untuk melihat kesejahteraan adalah Indeks Pembangunan Manusia. Pembangunan manusia merupakan masalah yang penting dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang adil dan merata bagi semua masyarakat Indonesia. Tinggi rendahnya pembangunan manusia dapat dilihat dari *Human Development Index* (HDI) atau yang lebih dikenal sebagai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikeluarkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP). Dari dimensi pembangunan, tingkat kesejahteraan masyarakat banyak diketengahkan, berbagai cara penilaian taraf kesejahteraan rakyat dan melalui indikator-indikator terukur dari pencapaian hasil pembangunan. Sejak tahun 1990, Badan dunia UNDP (*United Nations Development Programme*) mengadopsi suatu paradigma baru mengenai pembangunan yang disebut Paradigma Pembangunan

Manusia (PPM). Paradigma ini melihat manusia dari sisi yang lebih kompleks dan komprehensif karena disamping memperhitungkan keberhasilan pembangunan manusia dari aspek ekonomi, juga memperhitungkan keberhasilan pembangunan manusia dari aspek non-ekonomi (Prasetyoningrum dan Sukmawati, 2018).

Sejak tahun 2016, status pembangunan manusia Indonesia meningkat dari level “sedang” menjadi “tinggi”. Selama 2010–2022, IPM Indonesia rata-rata meningkat sebesar 0,77 persen per tahun, dari 66,53 pada tahun 2010 menjadi 72,91 pada tahun 2022. Setelah mengalami perlambatan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19, pada 2021 dan 2022 peningkatan IPM Indonesia terus membaik seiring dengan penanganan pandemi COVID-19 yang berjalan baik dan pemulihan kinerja ekonomi Indonesia (BPS, 2022).

Indeks pembangunan manusia terus berubah diikuti dengan fenomena ekonomi yang terjadi. Salah satu yang dapat memberikan pengaruh terhadap IPM ialah APBD. Sejak era otonomi daerah bergulir yang ditandai dengan berlakunya UU No.22 tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka pemerintah daerah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas SDM di wilayahnya, baik dari aspek fisik (kesehatan), aspek intelektualitas (pendidikan), aspek kesejahteraan ekonomi (berdaya beli), serta aspek moralitas (iman dan ketaqwaan) sehingga partisipasi rakyat dalam pembangunan akan dengan sendirinya meningkat (Paramita, 2020).

Tabel 1. 1 Data IPM Indonesia 2018-2022

| No | Provinsi | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Metode Baru) | | | | |
|----|------------------------------------|--|-------|-------|-------|-------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Provinsi Aceh | 71.19 | 71.90 | 71.99 | 72.18 | 72.80 |
| 2 | Provinsi Sumatera Utara | 71.18 | 71.74 | 71.77 | 72.00 | 72.71 |
| 3 | Provinsi Sumatera Barat | 71.73 | 72.39 | 72.38 | 72.65 | 73.26 |
| 4 | Provinsi Riau | 72.44 | 73.00 | 72.71 | 72.94 | 73.52 |
| 5 | Provinsi Jambi | 70.65 | 71.26 | 71.29 | 71.63 | 72.14 |
| 6 | Provinsi Sumatera Selatan | 69.39 | 70.02 | 70.01 | 70.24 | 70.90 |
| 7 | Provinsi Bengkulu | 70.64 | 71.21 | 71.40 | 71.64 | 72.16 |
| 8 | Provinsi Lampung | 69.02 | 69.57 | 69.69 | 69.90 | 70.45 |
| 9 | Provinsi Kepulauan Bangka Belitung | 70.67 | 71.30 | 71.47 | 71.69 | 72.24 |
| 10 | Provinsi Kepulauan Riau | 74.84 | 75.48 | 75.59 | 75.79 | 76.46 |
| 11 | Provinsi DKI Jakarta | 80.47 | 80.76 | 80.77 | 81.11 | 81.65 |
| 12 | Provinsi Jawa Barat | 71.30 | 72.03 | 72.09 | 72.45 | 73.12 |
| 13 | Provinsi Jawa Tengah | 71.12 | 71.73 | 71.87 | 72.16 | 72.79 |
| 14 | Provinsi DI Yogyakarta | 79.53 | 79.99 | 79.97 | 80.22 | 80.64 |
| 15 | Provinsi Jawa Timur | 70.77 | 71.50 | 71.71 | 72.14 | 72.75 |
| 16 | Provinsi Banten | 71.95 | 72.44 | 72.45 | 72.72 | 73.32 |
| 17 | Provinsi Bali | 74.77 | 75.38 | 75.50 | 75.69 | 76.44 |
| 18 | Provinsi Nusa Tenggara Barat | 67.30 | 68.14 | 68.25 | 68.65 | 69.46 |
| 19 | Provinsi Nusa Tenggara Timur | 64.39 | 65.23 | 65.19 | 65.28 | 65.90 |
| 20 | Provinsi Kalimantan Barat | 66.98 | 67.65 | 67.66 | 67.90 | 68.63 |
| 21 | Provinsi Kalimantan Tengah | 70.42 | 70.91 | 71.05 | 71.25 | 71.63 |
| 22 | Provinsi Kalimantan Selatan | 70.17 | 70.72 | 70.91 | 71.28 | 71.84 |
| 23 | Provinsi Kalimantan Timur | 75.83 | 76.61 | 76.24 | 76.88 | 77.44 |
| 24 | Provinsi Kalimantan Utara | 70.56 | 71.15 | 70.63 | 71.19 | 71.83 |
| 25 | Provinsi Sulawesi Utara | 72.20 | 72.99 | 72.93 | 73.30 | 73.81 |
| 26 | Provinsi Sulawesi Tengah | 68.88 | 69.50 | 69.55 | 69.79 | 70.28 |

| | | | | | | |
|----|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 27 | Provinsi Sulawesi Selatan | 70.90 | 71.66 | 71.93 | 72.24 | 72.82 |
| 28 | Provinsi Sulawesi Tenggara | 70.61 | 71.20 | 71.45 | 71.66 | 72.23 |
| 29 | Provinsi Gorontalo | 67.71 | 68.49 | 68.68 | 69.00 | 69.81 |
| 30 | Provinsi Sulawesi Barat | 65.10 | 65.73 | 66.11 | 66.36 | 66.92 |
| 31 | Provinsi Maluku | 68.87 | 69.45 | 69.49 | 69.71 | 70.22 |
| 32 | Provinsi Maluku Utara | 67.76 | 68.70 | 68.49 | 68.76 | 69.47 |
| 33 | Provinsi Papua Barat | 63.74 | 64.70 | 65.09 | 65.26 | 65.89 |
| 34 | Provinsi Papua | 60.06 | 60.84 | 60.44 | 60.62 | 61.39 |

Sumber : <https://simreg.bappenas.go.id/home/pemantauan/ipm>

Faktor lainnya yang dapat memberikan dampak terhadap indeks pembangunan manusia ialah pengangguran. Pengangguran terbuka merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan (baik bagi mereka yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja), atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (Bappeda, 2011). Tingkat pengangguran adalah persentase jumlah pengangguran terbuka terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran ini dapat mempengaruhi nilai IPM (Chalid dan Yusuf, 2014).

Pertumbuhan belanja daerah seharusnya sensitif terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi yang akan berdampak secara langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada daerah tersebut. Sumber-sumber belanja daerah salah satunya berasal dari PAD Besar kecilnya belanja daerah dapat meningkatkan atau mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Tingkat dari kemandirian suatu daerah terlihat dari

kemampuan PAD dalam membiayai pembangunan daerahnya sendiri. Belanja daerah yang berasal dari PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik (Patadang *et al*, 2021).

Dalam penelitian ini menggunakan 10 provinsi yang memiliki IPM paling besar dari tahun ke tahun selalu meningkat (2018-2022). Terutama di tahun 2022 IPM paling tinggi di miliki oleh 10 provinsi, yaitu: DKI Jakarta, DIY, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Bali, Sulawesi Utara, Riau, Banten, Sumatera Barat, Jawa Barat. Maka judul dari penelitian ini adalah “Pengaruh Belanja Daerah, Pendapatan Daerah, Pengangguran Terhadap Indeks Pembangunan Manusia”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Belanja Daerah terhadap indeks pembangunan manusia?
2. Bagaimana pengaruh pengangguran terhadap indeks pembangunan manusia?
3. Bagaimana pengaruh PAD terhadap indeks pembangunan manusia?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Terdapat pengaruh Belanja Daerah terhadap indeks pembangunan manusia
2. Terdapat pengaruh pengangguran terhadap indeks pembangunan manusia
3. Terdapat pengaruh PAD terhadap indeks pembangunan manusia

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan praktis adalah sebagai informasi dan masukan kepada peran pemerintah di Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang menyangkut pembangunan ekonomi dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Kegunaan ilmiah untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk kemajuan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu ekonomi pembangunan.
3. Kegunaan kondisi untuk pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat.